

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM

Nomor 24/PSDKP.4/TU.140/I/2023

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pengawasan Pengelolaan SDP
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 Januari 2023

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2022, terlampir kami sampaikan Laporan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara
Elektronik

Drama Panca Putra

Tembusan:
Sekretaris Ditjen PSDKP

LAPORAN KINERJA



TAHUN 2022



Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun 2022. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PPSDP di masa depan.

Jakarta, 10 Januari 2023

Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan,



Drama Panca Putra



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Laporan Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan.

Selama periode tahun 2022, Direktorat PPSDP **telah berhasil mencapai seluruh target** yang ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,70%. Pencapaian persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan sebesar **97,05%**. Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilaksanakan memperoleh total nilai sebesar **86,16**. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP telah **100%** diselesaikan pada tahun 2022. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP memperoleh nilai sebesar **82,22** dan masuk kategori Tinggi. Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat PPSDP memperoleh nilai **87,28**. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDP mendapatkan nilai **94,21**. Nilai implementasi Program Budaya Kerja memperoleh nilai **27,67**. Direktorat PPSDP telah menghasilkan **1 inovasi** Gugus Kerja Transformasi dalam waktu satu tahun. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP sebesar **100%**. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP sebesar **100%**. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar **96,76%**. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar **100%** dari target tahunan sebesar 70%.

Direktorat PPSDP memiliki alokasi anggaran awal sebesar Rp9,938,000,000. Setelah mengalami *refocusing* sebanyak 2 kali, anggaran Direktorat PPSDP menjadi Rp7,121,709,000. Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp7,117,806,143 atau 99,95% dari pagu anggaran. Pada tahun 2022 telah dilakukan revisi POK sebanyak 12 kali dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,92.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di tahun berikutnya.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 RENCANA STRATEGIS	5
2.2 PERJANJIAN KERJA	9
2.3 TARGET KINERJA	11
2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA	12
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	21
<i>SS1 - Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan</i>	21
<i>SS2 - Terselenggaranya Penyadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</i>	24
<i>SS3 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP</i>	26
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	41
3.4 EFISIENSI	42
BAB IV PENUTUP	43
4.1. KESIMPULAN	43
4.2. SARAN	43





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Satker UPT lingkup Ditjen PSDKP. Satker Pusat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Objek pengawasan berupa pelaku usaha penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan yang merupakan sebuah alat produksi pengelolaan perikanan serta aktivitasnya bersinggungan dengan ketersediaan sumber daya. Konsepsi pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perikanan yang dibangun saat ini sudah menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko. Sehingga usaha yang dimulai dan dijalankan sudah terjamin legalitas kegiatannya.

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan, di mana salah satunya yaitu pendekatan preventif, partisipatif dan koordinatif. Rincian *output* koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan menggambarkan sebuah upaya Satker Pusat untuk melakukan pendekatan berupa koordinasi, baik internal dan eksternal dalam kerangka pengawasan perikanan. Adapun hasil akhir yang hendak dicapai berupa kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan





kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PPSDP

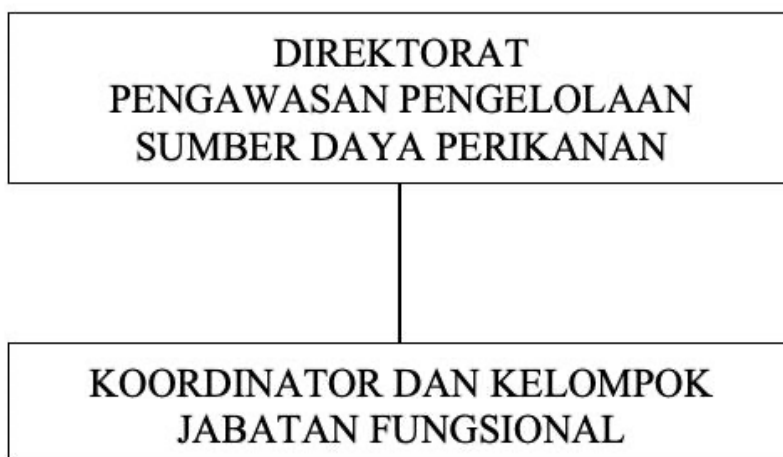
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PPSDP sebagai salah satu bagian dari Ditjen. PSDKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi hasil perikanan) termasuk pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PPSDP menyelenggarakan fungsi: ^{a)}Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan; ^{b)}Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan; ^{c)}Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan; ^{d)}Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan; ^{e)}Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan; dan ^{f)}Pelaksanaan urusan ketatausahaan.





Direktorat PPSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 48 Pegawai Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Direktur, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Madya sebanyak 6 (enam) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Muda sebanyak 6 (enam) orang, Pejabat Fungsional Perencana Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Arsiparis Terampil sebanyak 1 (satu) orang, Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Analis SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang, Analis Pengawasan SDKP sebanyak 19 (sembilan belas) orang, Pengelola Keuangan sebanyak 1 (satu) orang serta 8 (delapan) orang Pegawai Kontrak. Susunan organisasi Direktorat Pengawasan PPSDP terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PPSDP

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:





- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Direktorat PPSDP serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja Direktorat PPSDP, dan pengukuran capaian kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang analisis dan evaluasi pencapaian kinerja
- **Bab IV Penutup**, menyimpulkan secara menyeluruh Laporan Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi perbaikan di masa depan.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan Kinerja yang disusun oleh Direktorat PPSDP meliputi:

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020- 2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024*. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.





Visi : “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.





- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2021-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Program Ditjen. PSDKP 2021-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS KKP (AKIBAT)	SASARAN PROGRAM DITJEN PSDKP (SEBAB)	KETERANGAN
SS-6	Tata kelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 yang dijabarkan oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024.





Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat <i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat <i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif <i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	54,18	60	65	70	75
	<i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas <i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)</i>	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP <i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34
	<i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	4	5	6	7	8
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	3	3	3	3	3
	<i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>	60	65	70	75	80
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	88	89	89	90	90
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89

Direktorat PPSDP sebagai salah satu bagian dari Dirjen. PSDKP, menetapkan Sasaran Strategis tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang disesuaikan dengan bisnis proses di Kementerian melalui penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam suatu Peta Strategi dengan empat perspektif yang saling terkait, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customer*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learn and growth*.





1) Perspektif Stakeholder

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi

2) Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan (*customer*). Pengguna layanan (*customer*) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi

3) Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4) Perspektif Learn and Growth

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan *stakeholder*.

2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan itikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan





sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai. Tahun 2022 ditetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama. Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2022 berdasarkan hasil perbaikan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat PPSDP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	1. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha perikanan (%)	96
2.	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	2. Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	72
3.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	3. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP (%)	100
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	77
		5. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	77
		6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	90
		7. Nilai implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		8. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		9. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	75
		10. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	75
		11. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	86
		12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70





2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Target Kinerja Direktorat PPSDP Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TW1	TW2	SM1	TW3	Sd. TW3	TW4	SM2	THN
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	1. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha perikanan (%)	Posisi akhir	10%	25%	25%	60%	60%	96%	96%	96%
2	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	2. Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	Posisi akhir	0	0	72	0	0	72	72	72
3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat PPSDP	3. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi akhir	0%	0%	50%	0%	50%	100%	100%	100%
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	Posisi akhir	0	0	65	0	0	74	74	74
		5. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	Rata-rata	0	0	77	0	0	77	77	77
		6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	87,15	90	90
		7. Nilai implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	21	21	21





NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	POLA AKUMULASI PERHITUNGAN TARGET	TW1	TW2	SM1	TW3	Sd. TW3	TW4	SM2	THN
		8. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP (inovasi)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	1	1	1
		9. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	75%	75%	75%
		10. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	75%	75%	75%
		11. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	Rata-rata	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
		12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Rata-rata	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%

2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PPSDP adalah sebagai berikut:





1. Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan dengan target 96%. Beberapa kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan

No	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp.000)	SATUAN	TARGET	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
					J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o v	D e s	
1	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Perikanan	1.234.830	Kegiatan	2													
2	Pelaksanaan Pengawasan Perikanan	4.252.472	Laporan	12													
3	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi	1.537.000	Orang	1500													
4	Penyusunan Draft/Rancangan NSPK	370.000	NSPK	2													
5	Bimtek Pengawasan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	239.837	Orang	30													
6	Bimtek Pengawasan Ikan Hasil Tangkapan	245.359	Orang	30													
7	Bimtek Identifikasi Taksonomi Ikan	223.665	Orang	30													
8	Bimtek Pengawasan Standar Usaha Subsektor Pembudidaya Ikan	271.064	Orang	30													
9	Bimtek Pengawasan Standar Usaha Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran	202.099	Orang	30													
10	Bimtek Pengambilan Sampel Ikan Hasil Olahan yang Mengandung BTP Berbahaya	231.504	Orang	30													





2. Terselenggaranya Penysadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Efektif

Sasaran strategis ini memiliki indikator nilai pemahaman persentase kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan dengan target nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sebesar 72. Kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 6. sebagai berikut:

Tabel 6. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Terselenggaranya Penyadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan

No	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp.000)	SATUAN	TARGET	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
					J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o v	D e s
1.	Perencanaan Sosialisasi dan Diseminasi	143.500														
2.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi	1.537.000	orang	500												
3.	Evaluasi Sosialisasi dan Diseminasi	19.500														

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

Sasaran strategis ini memiliki beberapa indikator antara lain:

- Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSPDP (%)
- Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSPDP (indeks)
- Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSPDP (nilai)
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSPDP (nilai)
- Nilai implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
- Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)
- Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSPDP (%)
- Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PPSPDP (%)
- Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSPDP (%)





- j. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSPD yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Beberapa kegiatan pendukung untuk sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP tersaji pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP

NO	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN (RP. 000)	SATUAN	TARGET	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
					J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g u s	S e p	O k t	N o v	D e s	
1.	Perencanaan Draft/Rancangan NSPK	250.000															
2.	Penyusunan Draft/Rancangan NSPK	370.000	NSPK	2													
3.	Evaluasi Draft/Rancangan NSPK	245.300															
4.	Bimtek Pengawasan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	239.837	Orang	30													
5.	Bimtek Pengawasan Ikan Hasil Tangkapan	245.359	Orang	30													
6.	Bimtek Identifikasi Taksonomi Ikan	223.665	Orang	30													
7.	Bimtek Pengawasan Standar Usaha Subsektor Pembudidaya Ikan	271.064	Orang	30													
8.	Bimtek Pengawasan Standar Usaha Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran	202.099	Orang	30													
9.	Bimtek Pengambilan Sampel Ikan Hasil Olahan yang Mengandung BTP Berbahaya	231.504	Orang	30													





2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/ tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode *cascading*, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

1. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan

Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan adalah kesesuaian kegiatan para pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha perikanan terdiri dari pelaku usaha penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan adalah penilaian kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sesuai kewenangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria Kementerian/Lembaga, dilakukan dengan metode hasil inspeksi lapangan.

Penilaian kepatuhan teknis mencakup sebagaimana tercantum pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Rincian kriteria penilaian kepatuhan pelaku usaha perikanan

KRITERIA PENILAIAN	PENANGKAPAN & PENGANGKUTAN IKAN	PEMBUDIDAYAAN IKAN	PENGOLAHAN IKAN	PEMASARAN IKAN
a. Pemenuhan persyaratan umum usaha	20%	10%	20%	35%
b. Pemenuhan persyaratan khusus usaha	40%	40%	40%	35%
c. Pemenuhan sarana	5%	10%	10%	5%





KRITERIA PENILAIAN	PENANGKAPAN & PENGANGKUTAN IKAN	PEMBUDIDAYAAN IKAN	PENGOLAHAN IKAN	PEMASARAN IKAN
d. Kesesuaian struktur organisasi dan SDM	10%	5%	5%	5%
e. Pemenuhan pelayanan	5%	5%	5%	5%
f. Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa	15%	20%	10%	10%
g. Pemenuhan sistem manajemen usaha	5%	10%	10%	5%
TOTAL	100%			

Pelaku usaha dinyatakan patuh jika:

- Seluruh KBLI pada subsektor perikanan memenuhi persyaratan pada poin a-g dengan nilai minimal 70% **DAN** tidak dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan/atau pencabutan;
- Belum melaksanakan kegiatan usaha dalam rentang waktu kurang dari satu tahun sejak izin diterbitkan.

Tabel 9. Penilaian kepatuhan pelaku usaha perikanan

Poin	Sanksi Administratif	Keterangan
>=70	Tidak ada	Patuh
>=70	Ada	Tidak Patuh
<70	Ada	Tidak Patuh
<70	Tidak ada	Tidak Patuh

Formula perhitungan atau pengukuran persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan sebagai berikut:

$$X_{ppsdp} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha perikanan (%)

a = Jumlah pelaku usaha yang patuh

b = Jumlah pelaku usaha yang direncanakan diriksa tahun 2022

Detail Perhitungan:

- Data pelaku usaha yang direncanakan diriksa tahun 2022 berdasarkan data dari OSS yang ditampilkan oleh BKPM dan data hasil pulbaket
- Penilaian kepatuhan tidak melibatkan hasil penilaian dari pihak luar terkait penilaian administratif (BKPM/PTSP).





2. Persentase pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan

Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai stakeholder perikanan dalam memahami substansi terkait kepatuhan pelaku usaha di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan pengawasan distribusi hasil perikanan.

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah upaya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan sumber daya perikanan berupa sosialisasi, edukasi, *interview*, pengisian kuesioner dalam kegiatan maupun mandiri baik secara langsung atau *online* (daring).

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan meliputi bidang pengawasan penangkapan ikan, bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan pembudidayaan ikan dan bidang pengawasan distribusi hasil perikanan.

Peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan dapat terdiri dari para pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat pesisir.

Formula perhitungan atau pengukuran nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan sebagai berikut:

- Metode pengukuran nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumberdaya perikanan menggunakan kuesioner *post test* yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir kegiatan penyadartahuan;
- Nilai seluruh peserta kegiatan penyadartahuan dirata-rata sehingga diperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan;
- Tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta





kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan penangkapan ikan, bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan pembudidayaan ikan dan bidang pengawasan distribusi hasil perikanan.

$$Y_p = \frac{(Y_{kp} + Y_{olh} + Y_{bd} + Y_{dst})}{n}$$

Keterangan:

- Y_p = Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)
- Y_{kp} = Nilai peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan penangkapan ikan
- Y_{olh} = Nilai peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan pengolahan hasil perikanan
- Y_{bd} = Nilai peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan pembudidayaan ikan
- Y_{dst} = Nilai peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan distribusi hasil perikanan
- n = Jumlah peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan

Kategori:

- 0 - 20 = Tidak paham
- 21 - 40 = Kurang paham
- 41 - 60 = Cukup paham
- 61 - 80 = Paham
- 81 - 100 = Sangat Paham





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Selama periode tahun 2022, Direktorat PPSPD telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,70%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas IKU yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran dijelaskan pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Pencapaian kinerja Direktorat PPSPD Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	1. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha perikanan (%)	96	97,05	101,09
2.	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	2. Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	72	86,16	119,67
3.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	3. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSPD (%)	100	100	100,00
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSPD (indeks)	77	82,22	106,78
		5. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSPD (nilai)	77	87,28	113,35
		6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSPD (nilai)	90	94,21	104,68
		7. Nilai implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21	27,67	120,00





NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	PERSENTASE CAPAIAN (%)
		8. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	100,00
		9. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	75	100	120,00
		10. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	75	100	120,00
		11. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)	86	96,76	112,51
		12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70	100	120,00

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PPSDP telah melaksanakan kegiatan selama Januari – Desember 2022 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

SS1 - Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan

1. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Perikanan (%)

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan, persentase tersebut merupakan persentase kepatuhan dari seluruh pelaku usaha perikanan yang terdiri atas pelaku usaha penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.



IKU 1 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

$$X_{ppsdp} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Uraian	Uraian			Patuh PPSDP (a)	Riksa 2022 (b)	Nilai Kepatuhan (Xppsdp)
		Tidak Patuh	Patuh			
Pelaku Usaha Perikanan	Kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan	1	10	230	237	97,05%
	Kepatuhan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	3	45			
	Kepatuhan pelaku usaha pembudidayaan ikan	0	49			
	Kepatuhan pelaku usaha Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	3	126			

Indikator kinerja *persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan* periode Januari – Desember 2022 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 96% dengan memperoleh nilai capaian sebesar 97,05%. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa kepatuhannya. Pada tahun 2022, Direktorat PPSDP telah menetapkan pelaku usaha perikanan yang direncanakan pemeriksaan kepatuhan sebesar 237 pelaku usaha yang bersumber dari data hasil pulbaket pengawasan perikanan dan data/shortlist BKPM (melalui sistem OSS), sementara itu, data pelaku usaha perikanan yang patuh sebesar 230 pelaku usaha. Penetapan pelaku usaha yang patuh dilakukan atas hasil pengawasan rutin atau terjadwal dari Pengawas Perikanan berdasarkan rencana pengawasan yang telah disampaikan melalui subsistem pengawasan.

Tabel 11. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1	Usaha Penangkapan Ikan	94.00%	95.00%	95.00%	89.64%	96.00%	91.00%	98.00%
2	Usaha Pembudidayaan Ikan	94.00%	95.48%	95.00%	99.55%	96.00%	100.00%	98.00%
3	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	94.00%	96.99%	95.00%	99.17%	96.00%	94.00%	98.00%
4	Usaha Distribusi Hasil Perikanan	94.00%	100.00%	95.00%	99.80%	96.00%	98.00%	98.00%
Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		94.00%	96.87%	95.00%	97.04%	96.00%	97.05%	98.00%



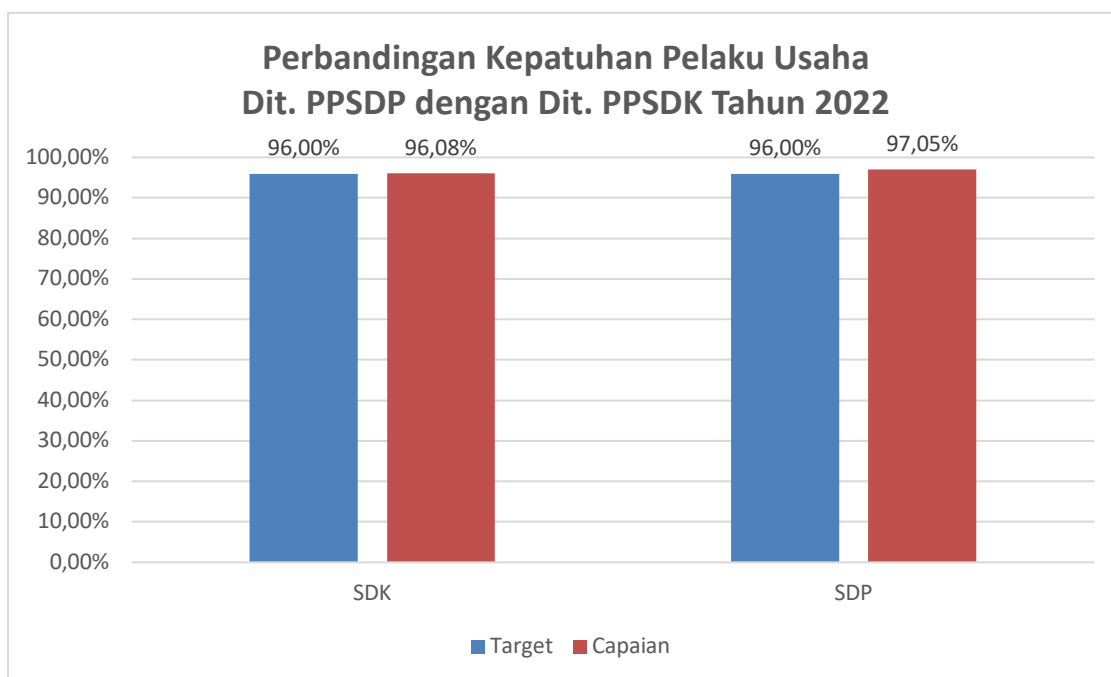
Merujuk data pada tabel 11, capaian indikator persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan mengalami peningkatan. Capaian indikator kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0.16% dari tahun 2020. Selanjutnya terhadap tahun 2021, peningkatan capaian kinerja sebesar 0.01%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan terdapat penyempurnaan rincian pencapaian kinerja yang tertuang dalam Informasi indikator kinerja.

Kepatuhan pelaku usaha perikanan yaitu kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2022, penilaian kepatuhan pelaku usaha perikanan berupa penilaian kepatuhan teknis yang diperoleh dari pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sesuai kewenangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan metode inspeksi lapangan.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya terjadi grafik peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Peningkatan capaian ini memperlihatkan bahwa hasil pelaksanaan pengawasan perikanan di tahun 2022 menunjukkan lebih banyak pelaku usaha yang telah melengkapi persyaratan usahanya (baik persyaratan umum atau persyaratan teknis). Setiap tahun Direktorat PPSDP senantiasa dapat mencapai target yang telah ditetapkan, melihat capaian tersebut Direktorat PPSDP berkomitmen untuk terus mencapai target yang diproyeksikan pada tahun 2024.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam pencapaian kinerja meliputi: ¹⁾Supervisi pengawasan perikanan yang dilakukan di Muara Baru, Karimunjawa, Semarang, Pangandaran, Pati, Pekalongan, NTT, dan Tual; ²⁾Koordinasi pelaksanaan pengawasan perikanan dengan pemerintah daerah yang dilakukan di Bali, Batang, Bandung dan Semarang; ³⁾Monitoring dan evaluasi pengawasan dengan pemerintah daerah yang dilakukan di Cirebon; ⁴⁾Pemeriksaan dan pengumpulan bahan keterangan terhadap UPI di Muara Baru; ⁵⁾Tindak lanjut pemantauan pelaku usaha perikanan yang dilakukan di Lampung.





Indikator kinerja kepatuhan pelaku usaha di lingkup Ditjen. PSDKP diampu oleh 2 unit kerja yaitu Direktorat PPSDK dan Direktorat PPSDP. Pada tahun 2022, capaian kinerja Direktorat PPSDP adalah 97,05%. Capaian Direktorat PPSDP lebih tinggi bila dibandingkan capaian kinerja Direktorat PPSDK.

SS2 - Terselenggaranya Penysadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

2. Nilai Pemahaman Peserta Kegiatan Penysadartahuan Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan (nilai)

Nilai pemahaman peserta kegiatan penysadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai *stakeholder* perikanan dalam memahami substansi terkait kepatuhan pelaku usaha di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan pengawasan distribusi hasil perikanan.

Daftar kegiatan penysadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PPSDP dijelaskan pada Tabel 12 sebagai berikut:





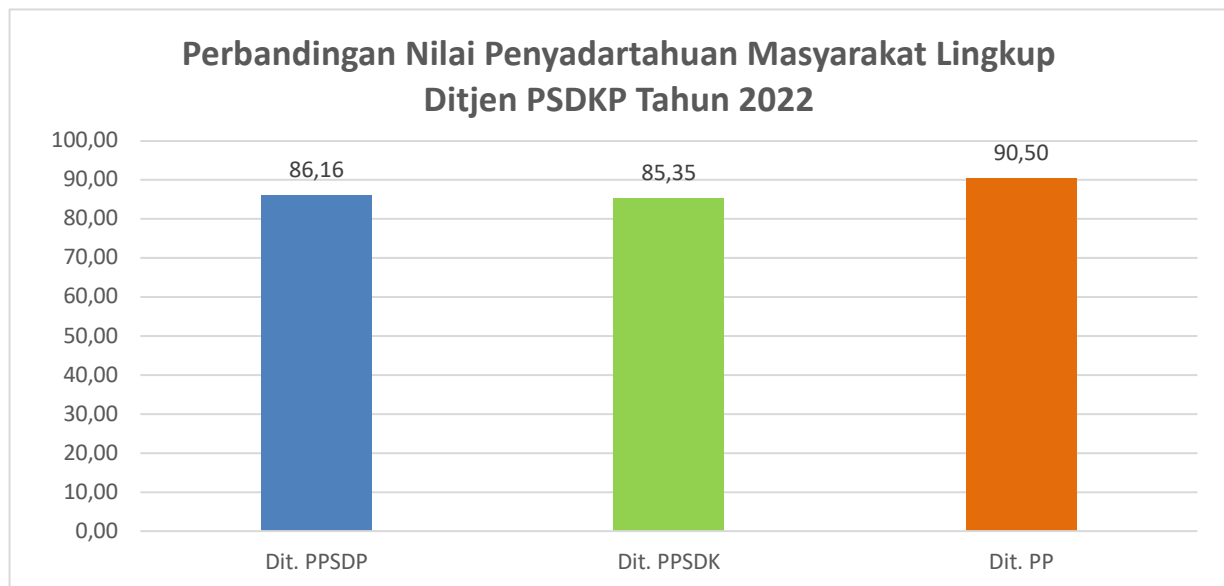
Tabel 12. Daftar penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan tahun 2022

Kegiatan	Lokasi/Waktu	Peserta	Jumlah Nilai Post Test
1. Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) yang Dilarang Peraturan Menteri KP No. 18 Tahun 2021	Cirebon, 31 Agustus 2022	200	17020
2. Sosialisasi Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko	Tegal, 5 September 2022	200	17120
3. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Produk Hasil Perikanan (Lobster, Kepiting, dan Rajungan)	Trenggalek, 9 September 2022	200	18460
4. Sosialisasi Larangan Pembudidayaan Ikan yang Membahayakan dan Merugikan	Magelang, 14 Oktober 2022	200	18640
5. Sosialisasi Kebijakan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Palembang, 29 September 2022	200	16500
6. Sosialisasi Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lobster	Palabuhanratu, 9 November 2022	200	17320
7. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan	Lampung, 11 Desember 2022	300	24180

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan Tahun 2022 telah mencapai target dengan memperoleh total nilai sebesar 86,16 dari target sebesar 72 dengan perhitungan sebagai berikut:

IKU 2 Pemahaman peserta kegiatan Penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan

$Y_p = \frac{\sum Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n}$	=	$\frac{17120+17320+17020+16500+18640+18460+24180}{1500}$	=	$\frac{129240}{1500}$	=	86,16
Keterangan:						
Y_p	Nilai Pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)					
Y	Jumlah nilai post test kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (nilai)					
n	Jumlah peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (orang)					





Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun tahun-tahun sebelumnya terjadi grafik kenaikan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi grafik penurunan nilai penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penurunan capaian ini disebabkan oleh adanya dinamika kebijakan yang perlu ditingkatkan penyadartahuannya, dan lokasi kegiatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 13. Perbandingan target dan Capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat pemahaman peserta penyadartahuan masyarakat bidang PPSDP	70	70	71	89	72	86,16	80

Kemudian, apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP nilai penyadartahuan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2022 berada di urutan kedua setelah Direktorat PP yang memiliki nilai 90,50 sedangkan Direktorat PPSDP sebesar 86,16.

Berdasarkan capaian nilai tahun 2022 diketahui bahwa antusias masyarakat terhadap materi yang disampaikan narasumber sudah sangat baik, terlihat dari tingkat pemahaman peserta yang memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 tingkat pemahaman peserta penyadartahuan ditingkatkan menjadi 80. Melihat tren di tahun 2022, maka target tahun 2024 dapat tercapai dengan catatan sosialisasi/penyadartahuan dikemas semakin menarik sehingga semakin mudah dipahami oleh para stakeholder.

SS3 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

3. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat PPSDP (%)

Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP yang diselesaikan pada tahun 2022 telah mencapai target dan memperoleh persentase sebesar 100% dari target sebesar 100%. Terdapat 2





NSPK yang sudah selesai perancangannya, yaitu:

- Draft* Rancangan Perdirjen PSDKP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pengawas Perikanan; dan
- Draft* Revisi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

IKU 3 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSPD

$d_{sdp} = \frac{\sum d_1 + d_2 + \dots + d_n}{n}$	=	$\frac{200\%}{2}$	=	100%
Keterangan:				
d_{sdp}	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSPD			
d	Hasil penilaian tahapan penyusunan rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSPD			
n	Jumlah rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSPD			

Keberhasilan penyusunan dua NSPK ini didukung oleh adanya perubahan kebijakan dan hasil pulbaket persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan sehingga mendorong percepatan penyelesaian NSPK ini.

Tabel 14. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

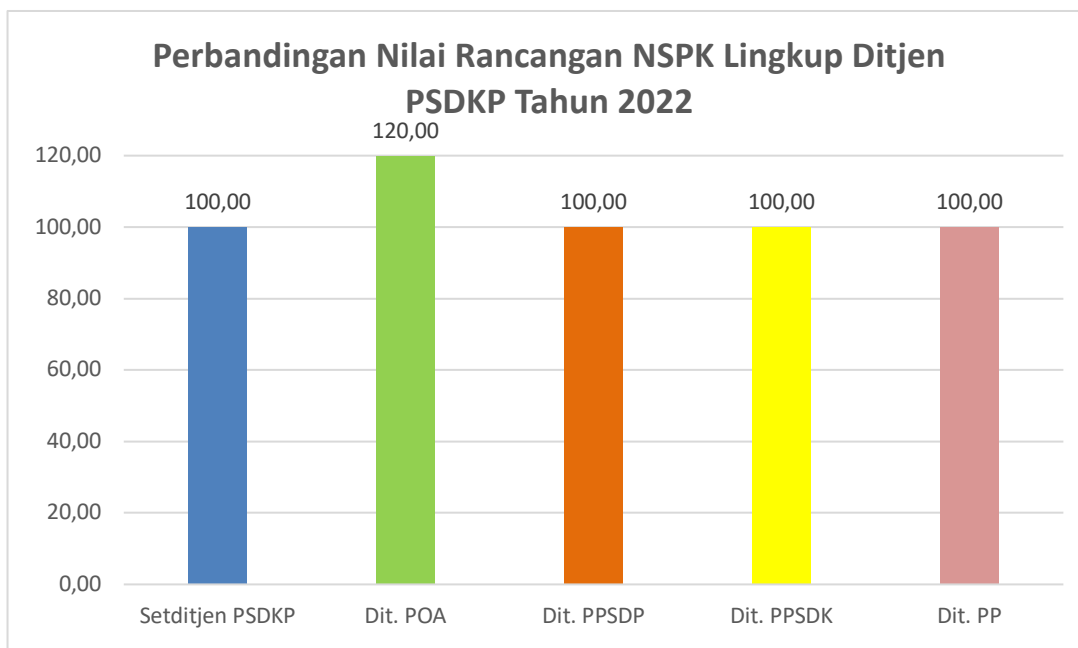
Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Direktorat PPSPD setiap tahun telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penyusunan NSPK ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan di bidang perikanan sehingga perlu penyesuaian strategi pengawasan. Setiap tahun Direktorat PPSPD senantiasa dapat menyelesaikan target yang telah ditetapkan yaitu 100% selesai, melihat capaian tersebut capaian pada tahun 2024 akan tercapai.





Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, rancangan NSPK lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2022 telah diselesaikan secara keseluruhan.



4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat PPSDP (indeks)

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP. Indikator Kinerja tersebut mengukur Profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pada tahun 2022, IKU tersebut sudah dilakukan analisa. Direktorat PPSDP telah mencapai target dengan memperoleh nilai sebesar 82,22 dari target 77 dan masuk ke dalam kategori Tinggi. Nilai tersebut diambil pada laman www.ropeg.kkp.go.id per 9 Januari 2023.

IP ASN 2022 Dashboard Eselon Pegawai FAQ

Silakan ketik Nama Unit Kerja...

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
16	STASIUN PSDKP BIAK	42	12,26	49,04 %	39,64	99,1 %	25,12	83,73 %	5	100 %	82,02	TINGGI
17	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	33	16,67	66,68 %	37,35	93,38 %	25	83,33 %	5	100 %	84,02	TINGGI
18	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	40	17,25	69 %	34,75	86,88 %	25,42	84,73 %	4,8	96 %	82,22	TINGGI
19	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	38	15,66	62,64 %	33,88	84,7 %	25	83,33 %	4,92	98,4 %	79,46	SEDANG

< 1 >





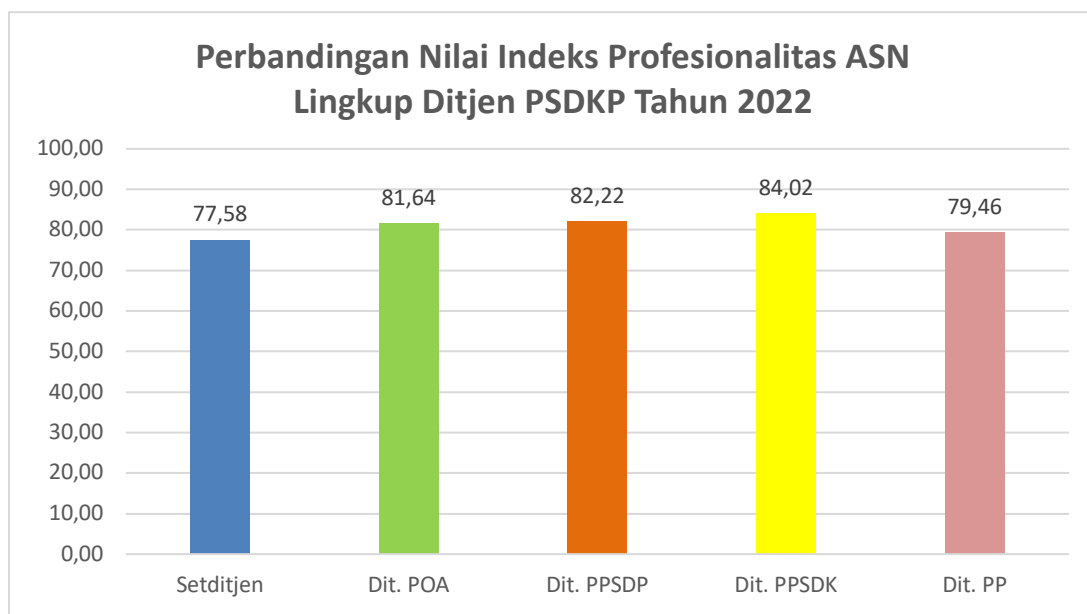
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP tahun 2022 didukung oleh kesadaran semua pihak dalam upaya peningkatan kapasitas ASN Direktorat PPSDP target tahun 2024 optimis dapat tercapai.

Tabel 15. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP	72	70	73	80	77	82,22	76

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan 2021 terjadi peningkatan pada indeks profesionalitas ASN. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa semakin banyak ASN lingkup Direktorat PPSDP yang mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi.

Jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 berada di urutan kedua setelah Direktorat PPSDK dengan nilai 84,02 sedangkan IP ASN Direktorat PPSDP sebesar 82,22.



5. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat PPSDP (nilai)

Pada tahun 2022, sudah diselenggarakan 6 kegiatan terkait Bimbingan Teknis (Bimtek) lingkup Direktorat PPSDP. Indikator Kinerja tersebut telah mencapai target dengan memperoleh nilai 87,28 dari target sebesar 77.





Berikut ini rincian bimtek pada Tabel 16:

Tabel 16. Daftar Bimbingan Teknis Direktorat PPSDP Tahun 2022

Bidang	Lokasi	Waktu	Peserta	Jumlah Nilai Post Test
Pengawasan Penangkapan Ikan	Maluku	22 – 25 Maret 2022	30 Orang	92
	Semarang	7 – 11 Juni 2022	30 Orang	84,2
Pengawasan Pembudidayaan Ikan	Yogyakarta	14 – 17 Juni 2022	30 Orang	93
	Sulawesi Selatan	16 – 19 Februari 2022	30 Orang	81
Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan	Batam	15 – 16 Maret 2022	30 Orang	92,2
Pengawasan Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	Bogor	9 – 12 Maret 2022	30 Orang	81,5

Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat PPSDP terus mengalami peningkatan. Hal itu didukung oleh semakin antusiasnya pengawas perikanan mengikuti kegiatan yang dapat menunjang kemampuan teknisnya.

Pada tahun 2024 pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat PPSDP ditargetkan dengan nilai 80, angka ini dapat tercapai selama Direktorat PPSDP sebagai penyelenggara semakin baik dan inovatif dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

IKU 5 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP							
$Z_p =$	$\frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{n}$	=	$\frac{84,2+93+81+92,2+81,3+92}{6}$	=	$\frac{523,7}{6}$	=	87,28
Keterangan:							
Z _p	Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat PPSDP (nilai)						
Z _i	Rata-rata nilai post test peserta bimtek lingkup Direktorat PPSDP (nilai)						
Z _n	Jumlah Bimtek lingkup Direktorat PPSDP						

Tabel 17. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat PPSDP	75	75	75	83	75	87,28	80

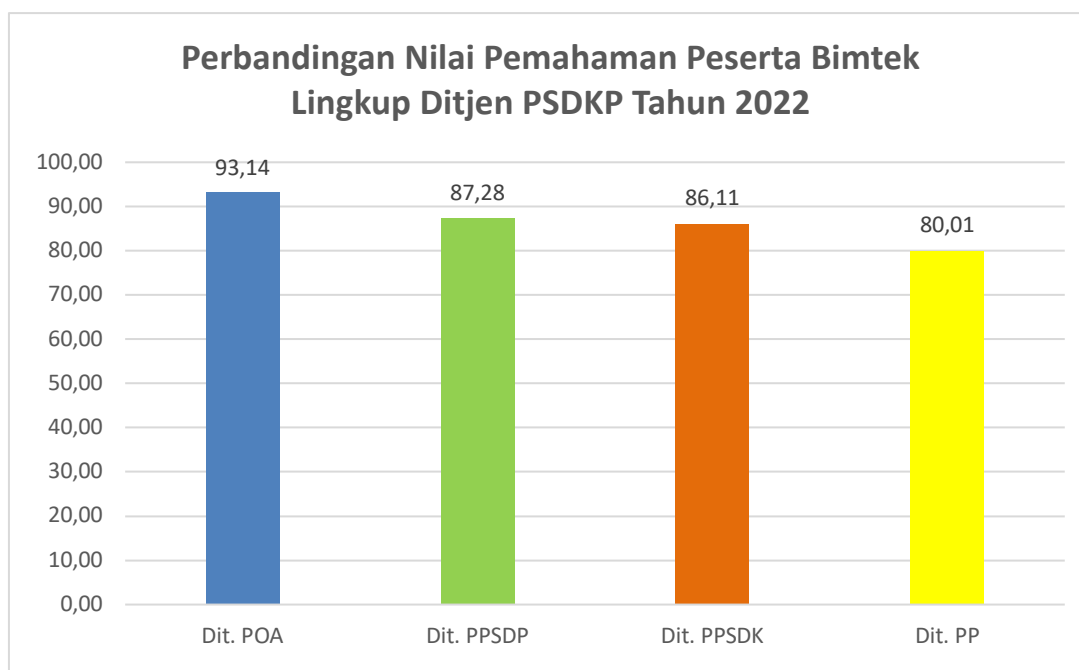
Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, 2021, dan 2022 terjadi grafik kenaikan pada nilai pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP. Kenaikan capaian ini memperlihatkan bahwa





meningkatnya antusias pengawas perikanan terhadap bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDP. Selain itu, kenaikan capaian ini juga didukung oleh narasumber-narasumber kompeten yang memberikan materi pada kegiatan ini.

Jika dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP, pemahaman peserta bimtek Direktorat PPSDP berada di urutan kedua setelah Direktorat POA yang memiliki nilai 93,14 sedangkan Direktorat PPSDP sebesar 87,28.



6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDP (nilai)

Rekonsiliasi lingkup Direktorat PPSDP telah dilaksanakan. Dari hasil yang telah disajikan Direktorat PPSDP telah mencapai target dengan memperoleh nilai 94,22 dari target sebesar 90. Namun, nilai tersebut belum maksimal pada bobot nilai ketercapaian, hal ini disebabkan oleh indikator nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan belum dilaksanakan pada Triwulan II, melainkan baru dilaksanakan pada Triwulan III. Sehingga target Triwulan II pada aplikasi Kinerja tidak mencapai target.





Tabel 18. Nilai Rekonsiliasi Tahun 2022

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESESUAIAN	KETERCAPAIAN	KETEPATAN
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	96,87	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	24,22	20,00
Total Skor	94,22			

Akan tetapi, Direktorat PPSDP telah memaksimalkan bobot lainnya dalam hal ini, nilai kepatuhan, nilai kesesuaian, dan nilai ketepatan. Hal ini didukung oleh Tim Pelaporan yang rutin berkoordinasi dengan Tim Perencanaan terkait dokumen-dokumen pendukung dalam penilaian rekonsiliasi.

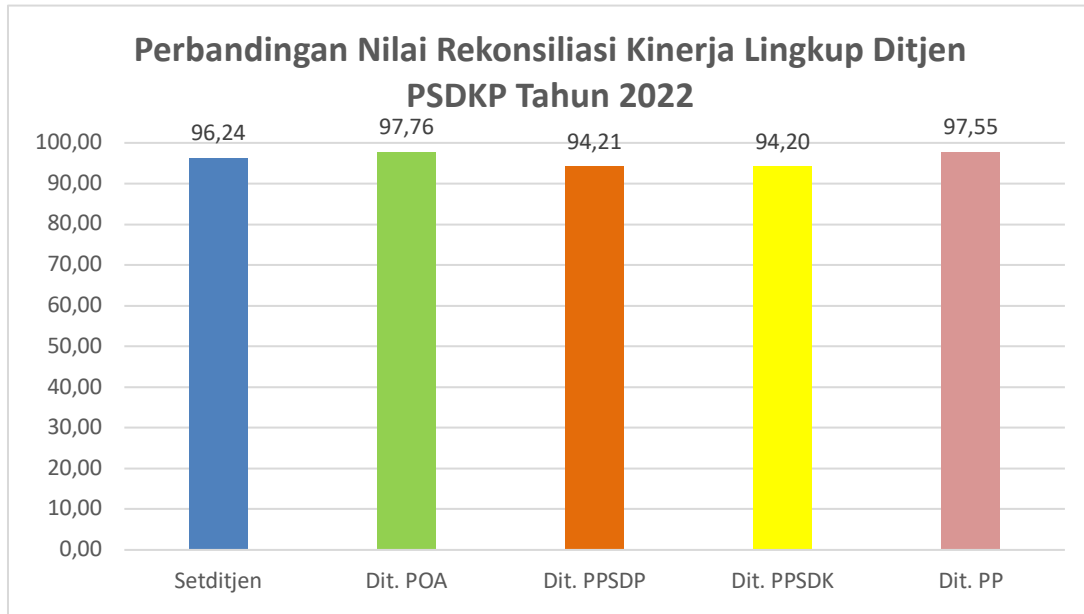
Tabel 19. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat PPSDP	87	87	90	88	86	94,21	87,5

Meskipun mendapatkan kenaikan dalam skornya, pada tahun berikutnya perbaikan yang akan dilakukan yaitu mempertahankan nilai kepatuhan, kesesuaian, ketepatan, dan terlebih lagi untuk meningkatkan bobot ketercapaian dalam mengawal indikator kinerja agar terlaksana sesuai target yang telah direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP, nilai rekonsiliasi Direktorat PPSDP berada di urutan ketiga setelah Direktorat POA dan Direktorat PP.





7. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

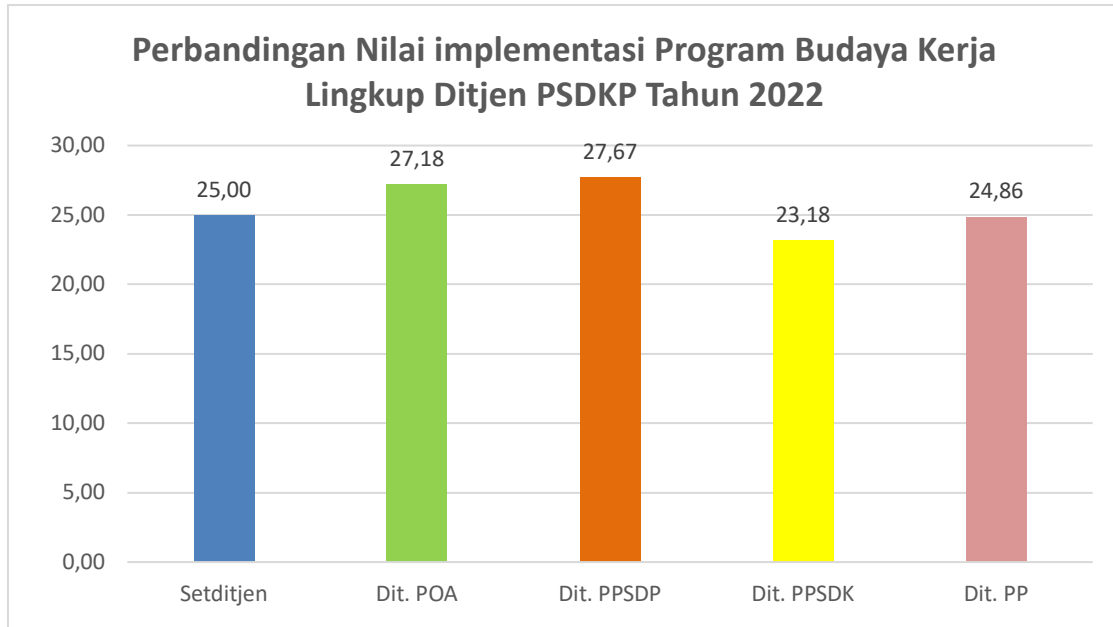
Nilai implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PPSDP telah mencapai target dengan memperoleh nilai sebesar 27,67 dari target nilai sebesar 21. Hal ini bersumber dari lembar kerja yang dinilai secara mandiri oleh masing-masing unit kerja dan didukung penuh oleh pegawai Direktorat PPSDP dalam menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Direktorat PPSDP. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024 karena merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2022.

Tabel 20. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Nilai implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	21	27,67	-

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, nilai implementasi program budaya kerja Direktorat PPSDP berada di urutan pertama dengan nilai 27,67.





8. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)

Inovasi Gugus Kerja Transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP dalam waktu satu tahun sebanyak 1 inovasi yaitu, Peningkatan Kualitas Pengawasan Perikanan Berbasis *Internet of Thing (IoT)* dan Terintegrasi dalam Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dengan tema “*Meningkatkan Jumlah Pemeriksaan Kapal Perikanan melalui Penerbitan HPK/SLO secara Elektronik di seluruh Indonesia sebagai Upaya Mendukung Penangkapan Ikan Terukur*”. Pada tahun 2022 Direktorat PPSDP mengalami penurunan peringkat, semula di tahun 2021 mendapatkan peringkat pertama sedangkan pada tahun 2022 mendapatkan peringkat ketiga.

Dalam hal menunjang keberhasilan tersebut, juga sudah dilakukan beberapa hal, di antaranya adalah Tim yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan aplikasi tersebut dilakukan *assesment skill* yang bertujuan untuk melihat apakah dalam prosesnya setiap tim mengalami perubahan *skill*. *Assesment skill* yang diuji yaitu kemampuan menguasai proses bisnis, pemahaman regulasi, kemampuan mengembangkan fitur, keahlian menyusun tampilan aplikasi, pemahaman terkait GKM dan keahlian dalam hal *development program*. Hasilnya yaitu setiap anggota tim mengalami peningkatan yang signifikan dari beberapa aspek yang dinilai tersebut.





Tabel 21. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP	1	1	1	1	1	1	1

Direktorat PPSDP senantiasa berinovasi dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Direktorat PPSDP diberikan target untuk membuat 1 inovasi. Berdasarkan tabel di atas setiap tahun Direktorat PPSDP dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 target juga akan terpenuhi karena komitmen Direktorat PPSDP untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan bagi *stakeholder*.



Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, seluruh unit kerja telah memenuhi atau menciptakan inovasi pada tahun 2022.

9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat PPSDP (%)

Selama tahun 2022, pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP sebesar 100%. Di mana capaian tersebut melebihi target yang semestinya, yaitu sebesar 75%. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.



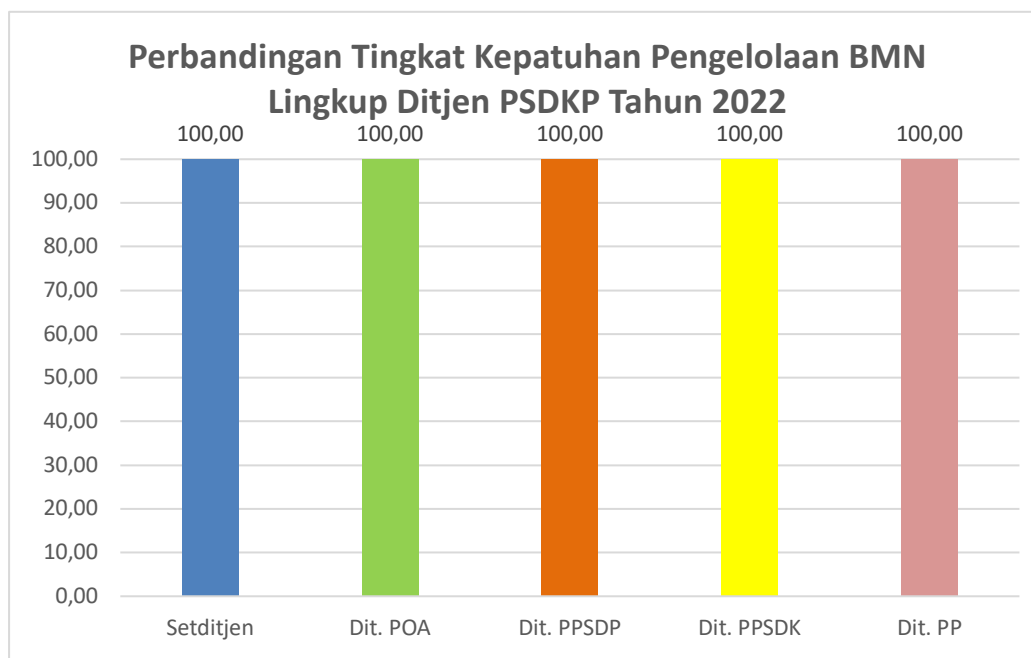


Tabel 22. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP (%)	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Keberhasilan Direktorat PPSDP dalam mencapai target kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2022 dipengaruhi oleh komitmen dari Direktorat PPSDP dalam memenuhi unsur-unsur pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN. Keberhasilan ini juga didukung SDM pengelola BMN yang andal sehingga pengelolaan BMN terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, operator pengelola BMN juga melakukan koordinasi secara berkala kepada Tim Pengelola BMN di Sekretariat Jenderal PSDKP.

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, tingkat kepatuhan pengelolaan BMN sama, dengan perolehan nilai sebesar 100%. Direktorat PPSDP berkomitmen untuk terus mencapai target pengelolaan BMN sehingga pada tahun 2024 target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai.





10. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat PPSDP (%)

Selama tahun 2022 penghitungan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP sebesar 100%. Capaian tersebut melebihi target yang semestinya, yaitu sebesar 75%.

Tabel 23. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat kepatuhan pengelolaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP (%)	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat PPSDP selama tahun 2022 dengan nilai Pagu 50-200 Juta sebanyak 15 paket pengadaan, seluruh paket diadakan menggunakan sistem pengadaan langsung.

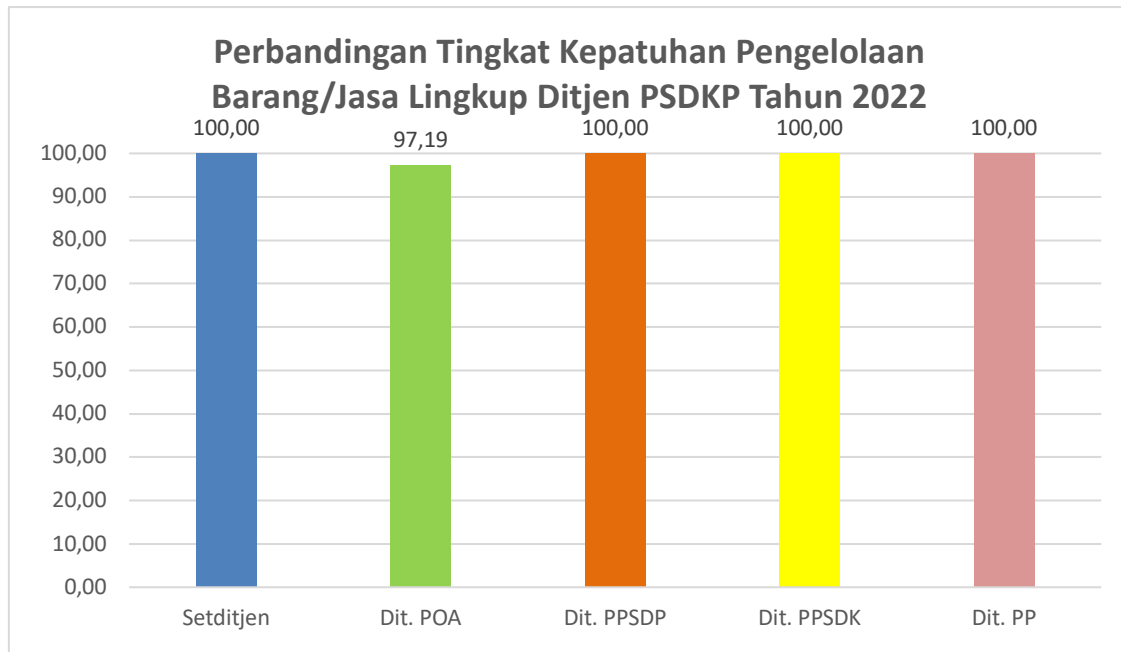
Paket-paket tersebut telah diumumkan semua pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pada saat perencanaan pengadaan sudah disusun KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Surat Perjanjian Kerja (SPK); Kesesuaian spesifikasi pengadaan telah diperiksa pada saat dilakukan serah terima barang hasil pengadaan dan seluruh pengadaan tersebut telah dibuatkan hasil laporan pengadnan setiap bulan.

Keberhasilan Direktorat PPSDP dalam mencapai target kepatuhan pengelolaan PBJ tahun 2022 dipengaruhi oleh komitmen dari Direktorat PPSDP dalam memenuhi unsur-unsur pengukuran kepatuhan pengadaan barang dan jasa. Keberhasilan ini juga didukung SDM pejabat pengadaan barang dan jasa yang andal dan akuntabel sehingga pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan baik.





Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, tingkat kepatuhan pengelolaan barang/jasa Direktorat PPSDP sama dengan Direktorat PP, Direktorat PPSDK, dan Setditjen PSDKP dengan nilai kepatuhan 100.



Direktorat PPSDP berkomitmen untuk terus mencapai target kepatuhan pengelolaan barang/jasa sehingga pada tahun 2024 target yang diproyeksikan optimis dapat dicapai.

11. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP (%)

Selama tahun 2022 capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP sebesar 96,76%. Capaian kinerja lingkup Direktorat PPSDP telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tidak lepas dari partisipasi aktif seluruh Pejabat Eselon II, Koordinator, Subkoordinator dan pelaksana lingkup Direktorat PPSDP.

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu persentase unit kerja Direktorat PPSDP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Perhitungan capaian ini didasarkan atas komponen yaitu: Dokumen (10%), Keikutsertaan (20%), dan Keaktifan (70%). Metode perhitungan keikutsertaan dan keaktifan menggunakan





bantuan aplikasi *bitrix* yang merupakan wadah bagi Pegawai KKP dalam berbagi dan mengakses informasi.

Penunjang keberhasilan yang akan dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai manajemen pengetahuan, Direktorat PPSDP akan membuat jadwal unggahan kegiatan. Selain itu, akan memantau siapa saja yang belum unggah tiap bulannya agar dapat diingatkan sehingga tidak terjadi lupa unggah kegiatan dan dapat memperbaiki nilai manajemen pengetahuan dari segi keaktifan.

Direktorat PPSDP dalam mengunggah agenda pada tiap bulannya ke dalam aplikasi *Bitrix* mengalami peningkatan. Target tahun 2024 dengan persentase 90% akan tercapai didukung dengan komitmen Direktorat PPSDP untuk meningkatkan keaktifan pegawai dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Direktorat PPSDP.

Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP	82%	76%	84%	98%	86%	96,76%	90%

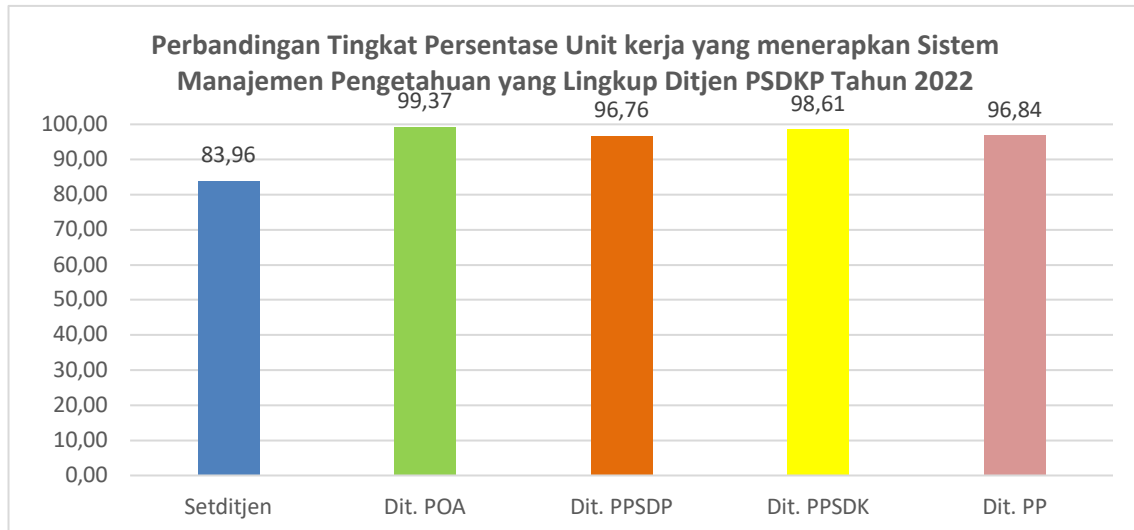
Apabila dibandingkan capaian pada tahun 2021 dengan 2022 terjadi penurunan pada presentasi manajemen pengetahuan Direktorat PPSDP. Indikator kinerja persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP diampu oleh 5 unit kerja yaitu Setditjen PSDKP, Direktorat POA, Direktorat PP, Direktorat PPSDK dan Direktorat PPSDP.

Apabila dibandingkan dengan Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP, capaian Direktorat PPSDP lebih rendah dari capaian Direktorat POA, Direktorat PPSDK dan Direktorat PP namun lebih tinggi dari Setditjen PSDKP.





12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)



Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP periode tahun 2022 yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 100% dari target tahunan sebesar 70%. Dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan ini, telah dilakukan koordinasi penyelesaian hasil rekomendasi. Sehingga, dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat pada Triwulan IV tahun 2022.

Tabel 25. Perbandingan target dan capaian pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target RENSTRA 2024

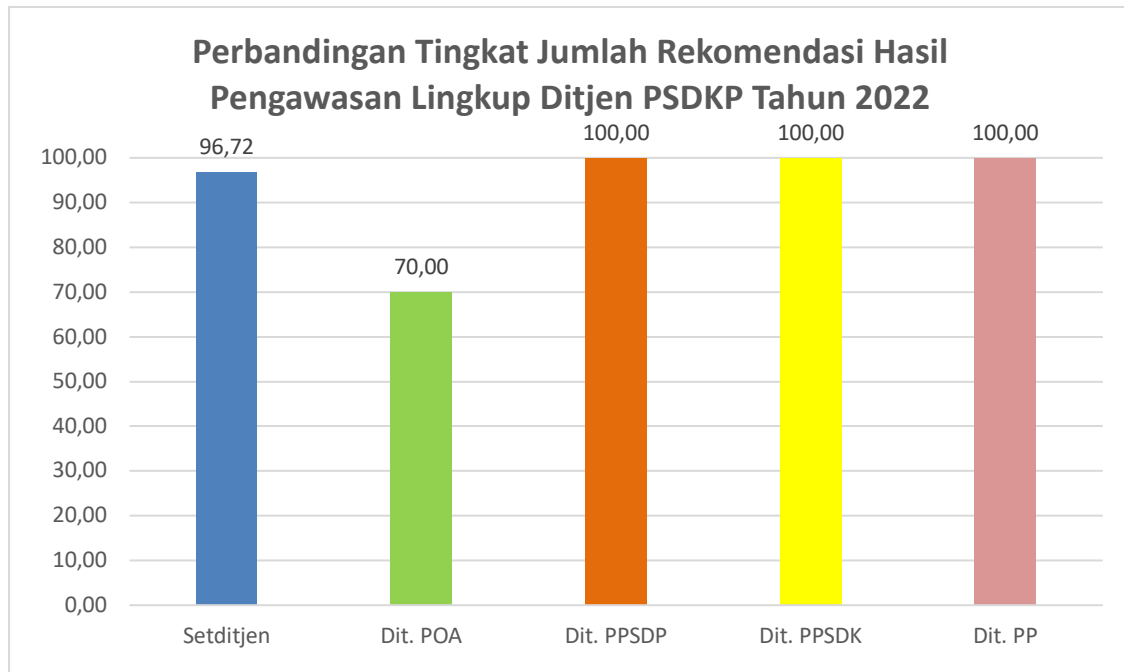
Uraian	2020		2021		2022		2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	82%	76%	65%	100%	70%	100%	80%

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan tahun 2022 tidak terjadi perubahan persentase penyelesaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP. Capaian kinerja yang masih dapat dipertahankan sebesar 100% memperlihatkan bahwa Direktorat PPSDP berupaya dapat segera menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan pada tahun 2022.





Indikator kinerja jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan diampu oleh 5 unit kerja yaitu Setditjen PSDKP, Direktorat POA, Direktorat PP, Direktorat PPSDK dan Direktorat PPSDP. Pada tahun 2022, capaian kinerja Direktorat PPSDP adalah 100%. Capaian Direktorat PPSDP lebih tinggi bila dibandingkan capaian kinerja Setditjen PSDKP dan Direktorat POA.



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PPSDP memiliki alokasi anggaran awal sebesar Rp9,938,000,000 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah). Setelah mengalami *refocusing* sebanyak 2 kali, anggaran Direktorat PPSDP menjadi Rp7,121,709,000 (Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp7,117,806,143 (Tujuh Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 99,95% dari pagu anggaran. Pada tahun 2022 telah dilakukan revisi POK sebanyak 12 kali dan diperoleh nilai efisiensi sebesar 0,92.





3.4 EFISIENSI

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada *stakeholder*, telah dilakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal pada tahun 2022. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi Smart Kemenkeu, nilai efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PPSDP adalah 0,92. Capaian nilai efisiensi ini didukung oleh tingkat penyerapan anggaran dengan persentase 99,95%. Rincian efisiensi anggaran pada setiap kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sebagaimana pada Tabel 26 berikut.

Tabel 26. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran lingkup Direktorat PSDP

Kode Satker	Nama Satker	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
449520	Sekretariat Ditjen. PSDKP	82,6	99,83	79,48	100	0,92	52,29





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PPSDP pada tahun 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 adalah:

4.1. KESIMPULAN

- a. Selama periode tahun 2022, Direktorat PPSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,70%.
- b. Pencapaian persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan sebesar 97,05%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang patuh (230) dan jumlah pelaku usaha yang diperiksa (237)

4.2. SARAN

- a. Untuk meningkatkan dan mengontrol Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Upaya-upaya *preemptif* dan *preventif* perlu dilakukan guna meningkatkan persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan.





LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drama Panca Putra**

Jabatan : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan

Drama Panca Putra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Perikanan	96%
SK1.2	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	ISK1.2.1	Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan	72
SK1.3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	ISK1.3.1	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP (%)	100%
		ISK1.3.2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP (indeks)	77
		ISK1.3.3	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP	77
		ISK1.3.4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDP (nilai)	90
		ISK1.3.5	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		ISK1.3.6	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		ISK1.3.7	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDP	75%
		ISK1.3.8	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDP	75%
		ISK1.3.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP	86%
		ISK1.3.10	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	70%

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	9.938.000.000
<i>SK1.1</i>	<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan</i>	
<i>SK1.2</i>	<i>Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan</i>	
<i>SK1.3</i>	<i>Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP</i>	
Total Anggaran		9.938.000.000

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan


Drama Panca Putra